BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP PADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, guna mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
10. Nomor Urut surat adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 001 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 001.
11. Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Negara, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten, Peraturan Kecamatan dan Qanun Gampong.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. sebagai pedoman bagi unit kerja pada Pemerintah Kabupaten untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;

b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan pada Pemerintah Kabupaten dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan pada Pemerintah Kabupaten; dan
d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi :
    a. fungsi fasilitatif; dan
    b. fungsi substantif.
(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
(5) Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut, dengan format baku kode klasifikasi/nomor urut/kode komponen/bulan (dalam angka romawi)/tahun.
(6) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka:
    000 Umum
    100 Pemerintahan
    200 Politik
    300 Keamanan/Ketertiban
    400 Kesejahteraan Rakyat
    500 Perekonomian
    600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
    700 Pengawasan
    800 Kepegawaian
    900 Keuangan
(7) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
(8) Kode Klasifikasi Arsip juga sebagai pedoman dasar klasifikasi penyusutan Arsip pada pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip.
(9) Penerapan Kode Klasifikasi ini tidak berlaku untuk kode penomoran surat Arsip Statuter yang mempunyai pedoman sesuai ketentuan perundang- undangan tersendiri.
(10) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 24 Juni 2024 M
17 Zulhijjah 1445 H

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

00 UMUM

00.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 00.1.1 Telekomunikasi
- 00.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 00.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 00.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 00.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - 00.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 00.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 00.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
- 00.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
- 00.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 00.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
  - 00.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
  - 00.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
  - 00.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 00.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
  - 00.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
  - 00.1.8.2 Penghijauan
  - 00.1.8.3 Perbaikan Gedung
  - 00.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
  - 00.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
  - 00.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 00.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
  - 00.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
  - 00.1.9.2 Pemasangan
- 00.1.10 Ketertiban dan Keamanan

00.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

00.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

00.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir

00.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

00.2 PERLENGKAPAN

00.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

00.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

00.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor

00.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor

00.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

00.2.3 Distribusi

00.2.3.1 Barang habis pakai

00.2.3.2 Barang milik daerah

00.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

00.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

00.3 PENGADAAN

00.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

00.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

00.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

00.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

00.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

00.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

00.4 PERPUSTAKAAN

00.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

00.4.2 Deposit Bahan Pustaka
- 00.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 00.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
- 00.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
- 00.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 00.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

00.4.3 Koleksi Pustaka
- 00.4.3.1 Pembelian
- 00.4.3.2 Hibah
- 00.4.3.3 Hadiah
- 00.4.3.4 Tukar Menukar
- 00.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
- 00.4.3.6 Terbitan Internal
- 00.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
- 00.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

00.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka

00.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

00.4.6 Layanan Perpustakaan
- 00.4.6.1 Keanggotaan
- 00.4.6.2 Peminjaman
- 00.4.6.3 Pengembangan gemar baca

00.4.7 Kerjasama Perpustakaan
- 00.4.7.1 MoU
- 00.4.7.2 Perjanjian kerjasama
- 00.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

00.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
- 00.4.8.1 Pengembangan situs web
- 00.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
- 00.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
- 00.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

00.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

00.4.10 Konservasi

00.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
00.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
00.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
00.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
00.4.12 Transformasi Digital
00.4.13 Kurasi Digital
00.4.14 Pengembangan Perpustakaan
00.4.14.1 Perpustakaan Umum
00.4.14.2 Perpustakaan Khusus
00.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
00.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

00.5 KEARSIPAN

00.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
00.5.2 Pembinaan Kearsipan
00.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
00.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
00.5.2.3 Penilaian Arsiparis
00.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
00.5.2.5 Data Base Arsiparis
00.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
00.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
00.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
00.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
00.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
00.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
00.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis

00.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

00.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)

00.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

00.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

00.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

00.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

00.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

00.5.6 Penyusutan Arsip

00.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

00.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

00.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

00.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

00.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

00.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

00.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

00.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

00.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan

00.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

00.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)

00.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

00.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)

00.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

00.5.9.7 Preservasi Kuratif

00.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

00.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

00.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

00.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN

00.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

00.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

00.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

00.5.15 Pengawasan Kearsipan

00.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal

000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal

000.5.15.3 Sanksi

00.6.2 Pengamanan persandian

00.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto

00.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto

7

00.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan

00.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi

00.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
00.6.3.2 Administrasi Pengkajian
00.6.3.3 Pelaksanaan
00.6.3.4 Pelaporan

00.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
00.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
00.6.4.2 Jaring Komunikasi

00.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
00.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
00.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
00.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
00.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
00.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
00.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
00.6.5.7 Pelaporan

00.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

00.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang

00.7.1.1 Musrenbang Provinsi
00.7.1.2 Musrenbang Nasional
00.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
00.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
00.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
00.7.1.6 Musrenbang Desa

00.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
00.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
00.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
00.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
00.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
00.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
00.7.2.6 Program kerja tahunan

00.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
00.7.2.8 Laporan Berkala
00.7.2.9 Laporan Insidential
000.7.2.10 Evaluasi Program

00.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

00.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan

00.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

00.7.6 Aksi Strategis Daerah

00.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah

00.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah

00.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah

00.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah

00.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah

00.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan

00.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
00.7.7.2 Pendanaan Daerah
00.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
00.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
00.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

00.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

00.8.1.1 Pembentukan
00.8.1.2 Pengubahan
00.8.1.3 Pembubaran

00.8.2 Uraian Jabatan

00.8.2.1 Analisa Jabatan

00.8.2.2 Analisa Beban Kerja

00.8.3 Ketatalaksanaan

00.8.3.1 Proses Bisnis

00.8.3.2 Standar Pelayanan

00.8.3.3 Standar Operasional Prosedur

00.8.3.4 Pelayanan Publik

00.8.4 Standar Kompetensi Jabatan strukturaldan fungsional

00.8.5 Evaluasi Kelembagaan

00.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

00.8.6.1 Budaya Kerja

00.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

00.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

00.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

00.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

00.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi

00.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan

00.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

00.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

00.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

00.9.6.1 Data

00.9.6.2 Statistik

00.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

00.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

00.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

00.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

00.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

- 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
- 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
- 100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

- 100.1.5.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 100.1.5.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 100.1.5.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.6 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
  - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil
  - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
  - 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
  - 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
  - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
  - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
  - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
  - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
  - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

- 100.3.1 Program Legislasi
  - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
  - 100.3.1.2 Program Legislasi
- 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)
- 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
  - 100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur
  - 100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati
  - 100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota
  - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
  - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
  - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
- 100.3.4 Instruksi/Surat Edaran
  - 100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi
  - 100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten

	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan

	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	**PEMILU**	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4 Perlindungan Masyarakat
300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi

300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)

300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporoan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
400.1.5.5 Ketenagakerjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data gender
400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak
400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak
400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari anak
400.3.2.4 **Block Grant**
400.3.3 Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2 **Block Grant**
400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan

	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru

400.3.10.3 Setifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7 Block grant
400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi

400.3.11 Penilaian Pendidikan
400.3.11.1 Penilaian Akademik
400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1 Olahraga Massal
400.4.3.2 Olahraga Tradisional
400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
400.4.4.3 Olahraga Prestasi
400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
400.4.5.1 Olahraga Tradisional
400.4.5.2 Layanan Khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2 Penghargaan Olahraga

400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
- 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
- 400.4.7.2 Kompetisi
- 400.4.7.3 IPTEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
- 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
- 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
- 400.4.9.1 Industri Olahraga
- 400.4.9.2 Promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi
- 400.4.10.1 Daerah
- 400.4.10.2 Nasional
- 400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
- 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
- 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
- 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
- 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
- 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
- 400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
- 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
- 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
- 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
- 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
- 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
- 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
- 400.5.5.1 Pengkajian
- 400.5.5.2 Pengembangan
- 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan	
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	**KEBUDAYAAN**	
400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya

400.6.5.2 Kekayaan budaya
400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9 Pembiayaan darah
400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan

	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum

	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita berisiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	

	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi

	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31	Rekam Medis	
400.8	**AGAMA DAN KEPERCAYAAN**	
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.8.2	Fasilitasi	
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	**SOSIAL**	
400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
400.9.3	Rehabilitasi Sosial	

	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan vrifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	

400.9.13.1 Perslapan pemberdayaan
400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.13.4 Kesesasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan

400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5 Bantuan Langsung
400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
400.10.4 Pemberdayaan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1 BudBudaya Nusantara
400.10.4.2 PemPemberdayaan Perempuan
400.10.4.3 PemPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4 Kes Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Ten Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
- 400.10.5.1 Usa Usaha Pertanian dan Pangan
- 400.10.5.2 Usa Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
- 400.10.5.3 Pro Produksi dan Pemasaran
- 400.10.5.4 Usa Usaha Ekonomi dan Keluarga
- 400.10.5.5 Eko Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
- 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
- 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
- 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
- 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
- 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan
- 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
- 400.11.2.2 Taman Kota
- 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman
- 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
- 400.11.3.2 Pemakaman
- 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau
- 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
- 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
- 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat

400.11.6 Pengawasan dan Penindakan

400.11.7 Pengelolaan Data

400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

400.12.2 Pendaftaran Penduduk
- 400.12.2.1 Identitas Penduduk
- 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
- 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara

400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1 Indikator Kependudukan
400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk

	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
400.13.7	Pengembangan Sistem	
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8	Pengembangan Materi	
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10	Analisis Sosial	
400.13.11	Analisis Ekonomi	
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria	
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41 Advokasi dan pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- 400.13.42.1 Promosi
- 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
- 400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
- 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
- 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
- 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi
- 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
- 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
- 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
- 400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
- 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
- 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah

400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat

400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media

400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

400.14.4.1 Kliping koran

400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat

400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan

400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah

400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM

400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)

400.14.5.5 Forum Kehumasan

400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa

400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD

400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten

400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal

400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

400.14.10 Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan

400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

	500.1.3.3	Cadangan Pangan
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	
500.1.7	Bimbingan Teknis	
500.1.8	Evaluasi	
500.2	**PERDAGANGAN**	
500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri	
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen

500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
500.2.3.11	Jasa
500.2.3.12	Kerjasama
500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
500.2.3.16	Pengawasan
500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1	Pengkajian pasar
500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
500.2.4.4	Pengkajian pasar
500.2.4.5	Pengembangan Pasar
500.2.4.6	Sistem Informasi
500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis
500.2.6	Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan

	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	

500.4	**KEHUTANAN**	
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.4.2	Penyuluhan

	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan	
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi

	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial

	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya

	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan

	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan

500.5.7.6	Penolakan
500.5.7.7	Pemusnahan
500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
500.5.7.11	Pemasukan Formulir
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14	Surat Perintah
500.5.7.15	Rekomendasi
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21	Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.6.2	Perlindungan hortikultura	
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan

500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi

500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standariasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa
	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman

500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28 Pelayanan Hukum
500.6.28.1 Sertifikasi
500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
500.6.29 Karantina Pertanian
500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
500.6.29.2 Karantina Hewan
500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1 Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran)
500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak
500.7.2.4 Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran)
500.7.3 Bimbingn Teknis
500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN
500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.4 T anaman Tahunan
500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1 Industri Manufaktur
500.9.2.2 Industri Agro
500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.3 Promosi Industri
500.9.3.1 Industri Manufaktur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro
500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
500.9.12	Standarisasi	
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
  - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
  - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.2.3 Pertambangan
  - 500.10.2.4 Panas Bumi
  - 500.10.2.5 Geosains
  - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
  - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
  - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
  - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
  - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
  - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
  - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
  - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
  - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
  - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
  - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.4.4 Survei Geologi
  - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
  - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
  - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
  - 500.10.5.4 Survei Geologi
- 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
  - 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
  - 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
  - 500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
  - 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

7

	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)

	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)

	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan T eknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE

500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja

500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)

500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)

500.10.20 Sertifikasi

500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik

500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan

500.10.22 Standarisasi Kompetensi

500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral

	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang

500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)

500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia

500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)

500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)

500.10.29.11 Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)

500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan

500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara

500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara

500.10.29.15 Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)

500.10.29.16 Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)

500.10.29.17 Pengawasan Teknis

500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara

500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)

500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan

500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan

500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi

500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi

500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi

500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi

	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

- 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
- 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
- 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
- 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
- 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
- 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
- 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
- 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
- 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

- 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

- 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
- 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
- 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
- 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor

- 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
- 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
- 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan

- 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
- 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
- 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
- 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
- 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang

- 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21 Tarif dan Keperintisan
500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24 Angkutan Perkotaan
500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	

	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerjasama	
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah

500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral

500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1 Pelayanan Informasi

500.12.18.2 Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata

500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata

500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri

500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman

500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasil Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta

500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
- 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
- 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
- 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
- 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
- 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian

500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
- 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
- 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
- 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
- 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga

500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
- 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
- 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
- 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan

500.15.6 Bina Pemagangan
- 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
- 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
- 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
- 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan

500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
- 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
- 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
- 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
- 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan

500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
- 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
- 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
- 500.15.8.3 Bursa Kerja
- 500.15.8.4 Analisis Jabatan

500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 500.15.9.1 Antar Kerja
- 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
- 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
- 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
- 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
- 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya

500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11 Standardisasi Profesi
500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2 Perjanjian Kerja
500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1 Pengupahan
500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan

500.15.20 Bina Penegakan Hukum
- 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
- 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
- 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum

500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
- 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
- 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
- 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
- 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
- 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
- 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
- 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur

500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
- 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
- 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
- 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
- 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
- 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha

500.16.4 Promosi Penanaman Modal
- 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
- 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
- 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
- 500.16.4.4 Promosi Sektoral
- 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
- 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi

500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
- 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
- 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
- 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
- 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
- 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
- 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
- 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
- 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
- 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
- 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
- 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
- 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
- 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
- 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
- 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
- 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
- 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
- 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
- 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
- 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah
- 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
- 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
- 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
- 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah

	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana

500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan

500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan

500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi

500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai

600.1.2.2 Kelembagaan

600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air

600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air

600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.3.2 Manajemen Mutu

600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air

600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai

600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai

600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)

600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo

600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan

	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung

600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1 Perencanaan Teknis
600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 Perencanaan Teknis
600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.5.2 Analisa Teknik

	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi

600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1 Antar Sektor
600.2.16.2 Antar Wilayah
600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 **TATA RUANG (TATA KOTA)**
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1 Peta Dasar

600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat

600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air

600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

600.4.3.1 Evaluasi Penerapan

600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan

600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan

600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan

600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan

600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa

600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas

600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan

600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa

600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas

600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan

600.4.8.1 Pengembangan

600.4.8.2 Pemanfaatan

600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik

600.4.8.4 Keamanan Hayati

600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan

600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem

600.4.9.2 Rawa

600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer

	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye

600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
- 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
- 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan

600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
- 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
- 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan

600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
- 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
- 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha

600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
- 600.4.23.1 Pengelolaan Data
- 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
- 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
- 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan

600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
- 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
- 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal

600.4.25 Standarisasi dan teknologi
- 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
- 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
- 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
- 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
- 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan
- 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
- 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
- 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
- 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
- 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut

700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat

700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review

700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)

800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)

800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.4 Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)

800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai

800.1.2.1 Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)

800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)

800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN

800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima

800.1.2.5 Pengangkatan ASN

800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)

800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN

800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN

800.1.3 Mutasi Pegawai

800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan

800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional

800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai

	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya)
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	1	Status Kepegawaian
	2	Kedudukan Kepegawaian
	3	Keberatan Pegawai
	4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

4

	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah

800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat

800.2.3 Widyaiswara

800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5 Sistem informasi diklat
800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)

900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran

900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report/Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	*Completion Report/Annual Report*
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan

900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)

900.1.7.3 Buku Rekening Bank

900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu,
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada,
Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan T eknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)

	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus. Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

33

Nomor : 100.3/ 7019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kode Klasifikasi Arsip.***----------

Banda Aceh, 22 Juni 2024
15 Dzulhijjah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4451/OTDA tanggal 13 Juni 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kode Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 800.1.11.1/6605, tanggal 18 Juni 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

PON XXI ACEH SUMUT 2024
BERSATU KITA JURA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juni 2024

Nomor : 100.2.2.6/4451/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kode Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/6616 tanggal 10 Juni 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kode Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kode Klasifikasi Arsip pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.